

IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG

Devin Musyaffa Marsa¹, R. Slamet Santoso²

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Universitas Diponegoro,
Kampus Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemerintah pada sektor pendidikan dalam upaya untuk mengatasi putus sekolah di Indonesia. Peserta didik pada jenjang SMA di Kecamatan Banyumanik yang menerima Bantuan PIP sebesar 316 siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Sumber data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik dengan menggabungkan teori Ketepatan Riant Nugroho dengan Implementasi Kebijakan Mazmanian/Sabatier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP di Kecamatan Banyumanik belum berjalan dengan baik, ditandai dengan masih banyaknya orang tua peserta didik yang kurang memahami mekanisme penyaluran PIP, sehingga peserta didik yang mengalami keterlambatan aktivasi akun dana pencairan PIP mmenjadi terhambat dan menyebabkan kuota penerima yang dapat berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi Karakteristik masalah, Dukungan politik dan Tahapan implementasi, ditemukan juga faktor kepentingan partai yang mempengaruhi keberjalanan PIP, dimana syarat pencalonan diri penerima PIP yang diusulkan oleh partai politik berbeda dengan regulasi mengenai PIP sehingga menyebabkan pencairan dana PIP tidak tepat sasaran. Rekomendasi pada penelitian yaitu melakukan sosialisasi yang lebih intens terkait monitoring dan evaluasi PIP untuk memastikan data penerima valid dan tepat sasaran, sehingga sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Ketepatan Kebijakan, Kecamatan Banyumanik, Peserta Didik

ABSTRACT

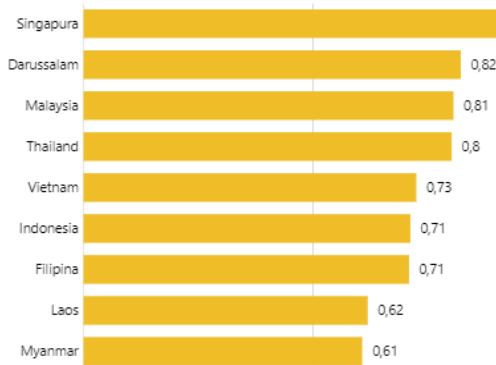
The Smart Indonesia Program (PIP) is a government program in the education sector in an effort to overcome school dropouts in Indonesia. Students at the high school level in Banyumanik District who received PIP Assistance amounted to 316 students. This study uses a qualitative method with *a purposive sampling technique*. Data sources are from the results of interviews, observations and documentation. This study aims to determine the policy implementation process and identify factors that affect the implementation of the Smart Indonesia Program in Banyumanik District by combining Riant Nugroho's theory of Accuracy with Mazmanian/Sabatier Policy Implementation. The results of the study show that the implementation of PIP in Banyumanik District has not gone well, marked by the fact that there are still many parents of students who do not understand the mechanism of PIP distribution, so that students who experience delays in activating PIP disbursement fund accounts are hampered and cause the recipient quota to be reduced. Influencing factors include the characteristics of the problem, political support and implementation stages, it was also found that party interest factors affect the running of PIP, where the requirements for the candidacy of PIP recipients proposed by political parties are different from regulations regarding PIP so that the disbursement of PIP funds is not on target. The recommendation in the study is to conduct more intense socialization related to PIP monitoring and evaluation to ensure that recipient data is valid and on target, so that it is in accordance with applicable regulations.

Keywords: Policy Implementation, Smart Indonesia Program, Banyumanik District, Policy Accuracy, Students

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs). Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah dibandingkan dengan negara di wilayah ASEAN. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan negara dalam mensejahterakan warganya.

Gambar 1 Indeks Pembangunan Manusia di ASEAN



Sumber: United Nations Development Programme (2022)

Indonesia berada di posisi ke-6 dengan skor IPM sebesar 0,713. Skor tersebut di bawah rata-rata global yang berada di angka 0,739. Sistem pendidikan nasional dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat internasional (Mulyasa, 2006). Kemiskinan merupakan faktor yang dapat menghambat dalam meningkatkan pendidikan, karena kemiskinan dapat membatasi masyarakat dalam memperoleh kualitas pendidikan yang layak (Herlina, 2017)

Gambar 2 Tingkat Kemiskinan di Indonesia 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2024)

Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020-2023 mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini dapat menjadi salah satu cara dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. Pemerintah juga memberikan target bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia harus berada pada 6,5 persen sampai 7,5 persen dalam RPJMD Tahun 2020-2024.

Pulau Jawa memiliki 8 Provinsi yang mempunyai persentase penduduk miskin yang berbeda-beda, Provinsi Jawa Tengah menduduki urutan kedua dengan total persentase 55,7%, hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih berada di atas 10% yang masih jauh dengan standar yang diberikan oleh pemerintah.

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa 2019-2023

No	Provinsi	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Yogyakarta	11,7%	12,2%	12,8%	11,3%	11%	59,1%
2	Jawa Tengah	10,8%	11,4%	11,7%	10,9%	10,7%	55,7%
3	Jawa Timur	10,4%	11%	11,4%	10,3%	10,3%	53,5%
4	Jawa Barat	6,9%	7,8%	8,4%	8%	7,6%	38,8%
5	Banten	5,1%	5,9%	6,6%	6,1%	6,1%	30%
6	DKI Jakarta	3,5%	4,5%	4,7%	4,6%	4,4%	21,8%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa

Tengah (diolah)

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah perlahan mengalami penurunan sejak tahun 2021-2023 hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, ketidakmampuan bekerja, perumahan, lingkungan. Pendidikan menjadi aspek yang paling berpengaruh. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan akibat dari pendidikan sebesar 27,44% terlihat penurunan sebesar 0,34% dari persentase kemiskinan pada aspek pendidikan pada

tahun 2019, tahun 2021 persentase kemiskinan kembali menurun sebesar 0,34% dari 27,44% pada tahun 2020, akan tetapi pada tahun 2022-2023 persentase kemiskinan akibat dari aspek pendidikan perlahan bertambah terlihat bahwa pada 2022 sebesar 27,22% dan pada tahun 2023 sebesar 27,34%.

Tabel 2 Aspek yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 2019-2023

No	ASPEK	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan	27,7%	27,4%	27,1%	27,2%	27,3%
2	Kesehatan	13,9%	13,7%	13,4%	13,6%	13,5%
3	Ketidakmampuan Bekerja	12,8%	12,6%	12,5%	12,7%	12,6%
4	Perumahan	12,2%	12,0%	11,8%	12,7%	12,6%
5	Lingkungan	11,3%	11,1%	11,0%	11,7%	11,6%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah peneliti, 2024)

Pemerintah dalam berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya dalam membangun pendidikan wajib mengikuti pendidikan dasar. Melahirkan indeks pembangunan manusia agar dapat memiliki daya saing yang tinggi dan berkualitas terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan menurut BPS yaitu standar kehidupan yang layak, harapan sekolah dan usia harapan hidup, Angka harapan putus sekolah yang tinggi menyebabkan angka pengangguran yang tinggi, karena memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas. Angka putus sekolah yang tinggi juga mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan (Kemendikbudristek, 2018).

Tabel 3 Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Semarang 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	4.949	4.445	4.0004	3.553	3.112
Jumlah Siswa SD/MI	172.456	168.345	164.234	160.123	156.012
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/MTS	4.241	3.914	3.589	3.314	3.044
Jumlah Siswa SMP/MTS	97.123	94.876	92.627	90.378	88.129
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA/SMK/MA	4.839	4.604	4.412	4.202	4.012
Jumlah Siswa SMA/SMK/MA	98.728	99.196	99.666	100.136	100.606

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah peneliti, 2024)

Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang dapat ditempuh. Hal ini berpengaruh pada peluang kerja di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu serius dan berkelanjutan dalam mengupayakan penurunan angka putus sekolah serta meningkatkan persentase siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA (Todaro, 2000).

Tabel 4 Indikator yang Mempengaruhi Kualitas Pendidikan di Kota Semarang 2019-2023

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah	5,7%	5,3%	4,9%	4,6%	4,2%
2	Partisipasi Sekolah Wajib Belajar (PSWB)	97,2%	97,4%	97,5%	97,7%	97,8%
3	Partisipasi Sekolah Usia 16- 18 Tahun	79,2%	80,1%	81,0%	82,0%	82,9%
4	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tamat SD/MI	92,4%	92,8%	93,2%	93,7%	94,1%
5	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tamat SMP/MTS	73,1%	74,4%	75,6%	76,9%	78,1%
6	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Tamat SMA/SMK/MA	49,2%	50,8%	52,4%	54,1%	55,7%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah (diolah peneliti, 2024)

Kota Semarang selaku Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai tepat untuk pertumbuhan ekonomi yang menjadi tepat tingkat kesenjangan ekonomi dan banyaknya keluarga miskin yang mendapatkan bantuan khususnya pada bidang pendidikan. Jumlah sekolah di setiap kecamatan Kota Semarang yang bertambah pada 2021-2022 dan

mengalami penurunan pada tahun 2023 menggambarkan bahwa pendidikan di Kota Semarang juga diperlukan perhatian khusus oleh pemerintah khususnya pada bidang pendidikan. Kecamatan Banyumanik memiliki akses pendidikan yang cukup baik, namun dominasi sekolah swasta menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Sekolah negeri cenderung lebih terjangkau atau bahkan gratis dibandingkan sekolah swasta yang masih memiliki biaya tambahan seperti SPP. Hal tersebut membuat orang tua peserta didik lebih cenderung memasukan anaknya ke sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta

Tabel 5 Data Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang 2021-2023

No	Wilayah	Data SMA		
		2021	2022	2023
1	Kec. Pedurungan	6	5	5
2	Kec. Tembalang	1	1	1
3	Kec. Banyumanik	9	9	9
4	Kec. Semarang Barat	13	13	14
5	Kec. Gunung Pati	4	5	4
6	Kec. Ngaliyan	2	3	2
7	Kec. Genuk	3	3	3
8	Kec. Mijen	5	5	5
9	Kec. Semarang Tengah	8	8	8
10	Kec. Semarang Utara	2	2	2
11	Kec. Semarang Timur	4	4	4
12	Kec. Semarang Selatan	5	5	5
13	Kec. Candisari	3	3	2
14	Kec. Gajah Mungkur	5	5	4
15	Kec. Gayamsari	3	3	3
16	Kec. Tugu	1	1	1
TOTAL		74	75	72

Sumber: Dapodikdasmen (diolah, 2024)
 Banyaknya sekolah yang berada di Kota Semarang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan dapat mengurangi angka putus sekolah, selain itu adanya bantuan dari Program Indonesia Pintar dapat menjangkau semua siswa, baik di sekolah negeri maupun swasta, disertai pengawasan yang efektif guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) bertujuan untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga kurang mampu. Program ini juga dirancang untuk membantu siswa yang sudah putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan yang layak. Selain itu, PIP bertujuan meringankan beban biaya pendidikan, baik

biaya langsung maupun tidak langsung, bagi keluarga yang membutuhkan.

Tabel 6 Jumlah Angka Putus Sekolah di Indonesia Dengan Pengalokasian Dana PIP tahun 2020-2022

No.	Tahun	SD	SMP	SMK	SMA	Alokasi DANA PIP	
						Jumlah Dana	Jumlah Siswa
1	2020	59.443	38.464	32.395	26.864	Rp 9.713.044.175.000,00	18.092
2	2021	44.516	11.378	13.951	13.879	Rp 9.628.233.300.000,00	18.084
3	2022	38.176	15.042	12.063	10.022	Rp 9.628.233.300.000,00	17.953
TOTAL		142.135	64.884	58.409	50.765	Rp 28.969.510.775.000,00	54.129
		316.193					

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id)

Angka putus sekolah yang semakin bertambah setiap tahunnya bertolak belakang dengan alokasi dana PIP yang diberikan kepada penerima PIP setiap tahunnya yang mengalami penurunan, hal ini hal ini membuat kebijakan pemerintah dalam mengatasi angka putus sekolah belum berjalan secara maksimal karena masih tingginya angka putus sekolah. Indonesia Corruption Watch (2018) menjelaskan bahwa sebagian dana PIP/KIP yang diberikan untuk membiayai pendidikan murid baik itu biaya personal maupun sumbangan ke sekolah, namun Sebagian besar dana Program Indonesia Pintar (PIP) belum sepenuhnya digunakan untuk keperluan pendidikan. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi kebijakan PIP setiap tahunnya guna memastikan dana tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Program Indonesia Pintar ini diharapkan dapat meningkatkan akses bagi keluarga yang kurang mampu dan mendukung pendidikan guna mensukseskan pendidikan gratis baik dari peserta didik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar dan mengurangi angka putus sekolah Pengajuan PIP di Kota Semarang terlihat banyak orang tua peserta didik yang rencana mengusulkan sebagai calon penerima PIP dan realisasi dana PIP yang bertambah setiap tahunnya hal ini karena dapat membantu membiayai sekolah peserta didik.

Tabel 7 Data Penyaluran PIP SMA di Kota Semarang tahun 2021-2023

Kecamatan	2021		2022		2023		Penerima PIP
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Kec. Semarang Utara	599	170	559	398	602	300	49%
Kec. Semarang Tengah	1035	262	509	615	944	431	45%
Kec. Ngaliyan	598	138	555	378	597	283	44%
Kec. Genuk	457	125	414	286	443	192	43%
Kec. Tembalang	294	53	247	164	251	110	43%
Kec. Gayamsari	204	59	191	154	167	70	41%
Kec. Semarang Barat	860	210	622	454	723	287	39%
Kec. Pedurungan	490	123	411	334	536	205	38%
Kec. Banyumanik	743	297	540	308	850	316	37%
Kec. Mijen	512	167	483	333	621	235	37%
Kec. Gajahmungkur	504	220	394	235	456	165	36%
Kec. Semarang Selatan	1009	215	932	509	1234	419	33%
Kec. Semarang Timur	337	97	290	152	280	95	33%
Kec. Candisari	305	127	109	75	226	46	20%
Kec. Gunung Pati	470	89	383	247	1201	193	16%
Kec. Tugu	6	1	8	1	35	0	2%

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id)

Penyaluran di 16 kecamatan di Kota Semarang berdasarkan data dijelaskan bahwa bahwa penyaluran dana Program Indonesia Pintar diklasifikasikan mmenjadi tiga kategori yaitu realisasi tinggi, realisasi sedang dan realisasi rendah. Terlihat dari jumlah dana yang disalurkan ke kecamatan yang ada di Kota Semarang, salah satunya Kecamatan Banyumanik terlihat pada data tersebut Kecamatan Banyumanik termasuk ke kategori realisasi yang sedang karena dana yang dicairkan dibandingkan dana yang disalurkan cukup jauh untuk perbandingannya dan terdapat fluktuasi data, dana penyaluran PIP yang diberikan tentunya juga mengalami perbedaan yang berpengaruh terhadap persentase penerima bantuan PIP.

Gambar 3 Dana Penyaluran PIP SMA di Kota Semarang tahun 2021-2023

Kecamatan	2021		2022		2023		Persentase Penerima PIP
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
Kec. Semarang Utara	Rp. 525.000.000	Rp. 152.500.000	Rp. 479.000.000	Rp. 341.000.000	Rp. 514.500.000	Rp. 241.000.000	49%
Kec. Semarang Tengah	Rp. 1.805.000.000	Rp. 232.500.000	Rp. 760.500.000	Rp. 546.500.000	Rp. 827.000.000	Rp. 252.500.000	49%
Kec. Ngaliyan	Rp. 486.500.000	Rp. 118.500.000	Rp. 486.500.000	Rp. 344.000.000	Rp. 545.000.000	Rp. 292.000.000	44%
Kec. Genuk	Rp. 378.500.000	Rp. 106.500.000	Rp. 360.500.000	Rp. 251.000.000	Rp. 400.000.000	Rp. 165.500.000	43%
Kec. Tembalang	Rp. 246.500.000	Rp. 44.500.000	Rp. 225.000.000	Rp. 149.000.000	Rp. 227.500.000	Rp. 92.000.000	43%
Kec. Gayamsari	Rp. 170.500.000	Rp. 51.500.000	Rp. 169.500.000	Rp. 133.000.000	Rp. 151.000.000	Rp. 58.500.000	41%
Kec. Semarang Barat	Rp. 737.000.000	Rp. 181.500.000	Rp. 550.500.000	Rp. 400.500.000	Rp. 664.500.000	Rp. 246.000.000	39%
Kec. Pedurungan	Rp. 410.000.000	Rp. 113.000.000	Rp. 365.500.000	Rp. 296.000.000	Rp. 497.000.000	Rp. 180.000.000	38%
Kec. Banyumanik	Rp. 616.500.000	Rp. 235.500.000	Rp. 482.000.000	Rp. 279.000.000	Rp. 736.500.000	Rp. 267.500.000	37%
Kec. Mijen	Rp. 431.500.000	Rp. 146.500.000	Rp. 414.000.000	Rp. 284.000.000	Rp. 551.000.000	Rp. 198.000.000	37%
Kec. Gajahmungkur	Rp. 483.500.000	Rp. 215.000.000	Rp. 364.500.000	Rp. 208.500.000	Rp. 432.500.000	Rp. 157.000.000	36%
Kec. Semarang Selatan	Rp. 887.500.000	Rp. 190.000.000	Rp. 833.000.000	Rp. 448.000.000	Rp. 1.167.000.000	Rp. 376.000.000	33%
Kec. Semarang Timur	Rp. 307.500.000	Rp. 87.500.000	Rp. 229.000.000	Rp. 118.500.000	Rp. 257.500.000	Rp. 86.000.000	33%
Kec. Candisari	Rp. 286.500.000	Rp. 122.500.000	Rp. 90.500.000	Rp. 59.500.000	Rp. 214.000.000	Rp. 39.500.000	20%
Kec. Gunung Pati	Rp. 394.500.000	Rp. 75.000.000	Rp. 349.000.000	Rp. 223.000.000	Rp. 989.000.000	Rp. 167.000.000	16%
Kec. Tugu	Rp. 6.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 4.500.000	Rp. 1.000.000	Rp. 31.500.000	Rp. 1.000.000	2%

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id)

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 anggaran yang disalurkan sebesar Rp. 616.500.000, namun dana yang berhasil dicairkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 235.500.000, selanjutnya pada tahun 2023 anggaran yang disalurkan sebesar Rp. 736.500.000, lebih tinggi angka penyalurannya dibanding tahun sebelumnya, namun dana yang berhasil

dicairkan sebesar Rp. 267.500.000. Perbedaan ini cukup besar antara dana yang disalurkan dengan dana yang dicairkan sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan Program Indonesia Pintar sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Indonesia Pintar agar sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusnaeni, R. A., & Rostyaningsih, D. (2022) yang lokus penelitiannya berada di Kabupaten Semarang, permasalahan dalam penelitian ini yaitu terlihat terdapat ketidaksesuaian antara capaian target dari Program Indonesia Pintar tidak sesuai dengan jumlah peserta didiknya, hal tersebut sering terulang di setiap tahun berikutnya.

Kota Semarang menghadapi tantangan dalam pelayanan pendidikan akibat meningkatnya jumlah SMA dan penambahan populasi setiap tahunnya. Salah satu contohnya adalah Kecamatan Banyumanik, yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang beragam. Pada tahun 2022, menurut BPS Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi keempat di kota tersebut.

Tabel 7 Jumlah Peserta Didik SMA di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

No	Nama Sekolah	Tingkat	Status	Peserta Didik		
				2021	2022	2023
1	SMA NEGERI 04	SMA	Negeri	1.176	1.179	1.180
2	SMA NEGERI 09	SMA	Negeri	1.152	1.147	1.180
3	SMA ISLAM AL AZHAR 14	SMA	Swasta	323	396	451
4	SMA ISLAM HIDAYATULLAH	SMA	Swasta	356	376	381
5	SMA MARDISISWA	SMA	Swasta	274	269	240
6	SMA MULTAZAM IBS	SMA	Swasta	70	86	92
7	SMA NASIONAL	SMA	Swasta	4	0	0
8	SMA PERMATA BANGSA	SMA	Swasta	21	17	15
9	SMA BINA BANGSA SCHOOL	SPK SMA	Swasta	86	74	91
Total				3.462	3.544	3.630

Sumber: Dapodikdasmen (diolah, 2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa Sekolah negeri cenderung memiliki jumlah peserta didik lebih banyak dibandingkan sekolah swasta. Hal ini disebabkan oleh biaya pendidikan di sekolah negeri yang umumnya lebih murah atau bahkan gratis, sehingga mmenjadi pilihan utama bagi

orang tua dengan keterbatasan finansial. Hal tersebut juga mendorong orang tua peserta didik untuk mengajukan bantuan PIP kepada pihak sekolah.

Tabel 8 Jumlah Siswa Penerima PIP di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

No	Nama Sekolah	2021		2022		2023	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	SMA NEGERI 04	162	150	201	115	252	119
2	SMA NEGERI 09	227	224	254	153	322	141
3	SMA MARDISISWA	40	40	58	32	204	48
4	SMA MULTAZAM IBS	5	5	8	5	36	4
5	SMA ISLAM AL AZHAR 14	6	4	6	0	5	0
6	SMA ISLAM HIDAYATULLAH	6	2	1	1	9	2
7	PKBM NGUDI KAWRUH	-	-	9	0	18	1
8	PKBM ANUGRAH BANGSA	-	-	3	2	1	1
Jumlah		446	425	540	308	847	316

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id)

Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Banyumanik pada tahun 2021-2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Hal serupa juga terjadi pada jumlah siswa penerima PIP di SMA Negeri 4, SMA Negeri 9, dan SMA Mardasiswa Kota Semarang. Di antara sekolah tersebut, SMA Mardasiswa, yang berada dalam kategori realisasi sedang, menunjukkan penerapan PIP yang lebih baik dibandingkan sekolah swasta lain di Kecamatan Banyumanik. Implementasi Program Indonesia Pintar ini juga berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar kelurahan, seperti Kelurahan Srandol Wetan, tempat SMA Negeri 4 dan SMA Mardasiswa berada.

Tabel 9 Jumlah Partisipasi Pendidikan SMA di Kecamatan Banyumanik

Kelurahan	2021		2022		2023	
	Belum/Tidak Sekolah	Sudah Sekolah (SMA)	Belum/Tidak Sekolah	Sudah Sekolah (SMA)	Belum/Tidak Sekolah	Sudah Sekolah (SMA)
PUDAKPAYUNG	5,63%	6,98%	5,86%	7%	5,91%	7,06%
GEDAWANG	2,59%	2,63%	2,76%	2,76%	2,81%	2,79%
JABUNGAN	1,22%	0,77%	1,26%	0,81%	1,31%	0,86%
PEDALANGAN	2,49%	3,03%	2,57%	2,94%	2,59%	2,95%
BANYUMANIK	2,62%	3,66%	2,79	3,71%	2,89%	3,72%
SRONDOL KULON	3,27%	3,99%	3,31%	3,99%	3,22%	3,92%
SRONDOL WETAN	4,46%	6,31%	4,60%	6,21%	4,58%	6,15%
NGESREP	3,07%	4,35%	3,01%	4,35%	2,95%	4,35%
TINJOMOYO	2,55%	2,94%	2,54%	2,98%	2,48%	2,98%
PADANGSARI	2,62%	3,59%	2,66%	3,50%	2,66%	3,46%
SUMURBOTO	2,09%	2,45%	2,11%	2,40%	2,08%	2,36%
Total	32,60%	40,71%	33,47%	40,64%	33,48%	40,60%

Sumber : Si Pintar (pip.kemdikbud.go.id)

Kelurahan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu, mengidentifikasi penerima, verifikasi dan validasi data, usulan penerima, Koordinasi antara kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020, Program Indonesia

Pintar (PIP) bertujuan utama untuk mencegah siswa putus sekolah.

Pentingnya pendidikan serta manfaat dari Program Indonesia Pintar dalam meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di wilayah Kecamatan Banyumanik khususnya pada jenjang sekolah menengah atas di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Berdasarkan uraian tersebut, maka masalah yang muncul adalah mengapa implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Semarang masih belum berjalan dengan efektif

Implementasi PIP di Kecamatan Banyumanik juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyaluran bantuan PIP, dan mencari solusi strategis untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan PIP. Sehingga peneliti mengambil judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG”**

KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1998) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan Administrasi publik adalah sumber daya dan perangkat publik yang dikelola untuk mengimplementasikan serta mengelola kebijakan publik. Sebagai ilmu dan seni, administrasi publik berperan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan. Bidang ini berfokus pada penyelesaian permasalahan publik melalui perbaikan aspek organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Menurut Yogi (2011). Menjelaskan bahwa kata "publik" menyiratkan kepentingan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, "publik" mengacu pada sesuatu yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat. Istilah ini menunjukkan bahwa setiap kalangan masyarakat tertuju pada rakyat secara umum. Dengan demikian, administrasi publik menjadi suatu disiplin yang terkait erat dengan penerapan konsep untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Paradigma Administrasi Publik

Menurut Keban (2008) yang merujuk pada teori Nicholas Henry, konsep Administrasi Negara dapat dibagi menjadi enam perspektif utama:

1. Paradigma 1 (Dikotomi Politik Administrasi, 1900-1926): Frank J. Goodnow dan Leonard D. White membedakan politik, yang berfokus pada pembuatan kebijakan, dan administrasi, yang lebih menekankan pada pelaksanaan kebijakan. Namun, pandangan ini hanya menyoroti aspek birokrasi pemerintahan tanpa menjelaskan secara mendalam tentang metode administrasi publik.
2. Paradigma 2 (Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937): Tokoh seperti Willoughby, Gullick, dan Urwick, Terinspirasi oleh pemikiran manajemen klasik, mereka menjelaskan dan memperkenalkan prinsip administrasi POSDCORB (Perencanaan, Pengorganisasian, Penataan Staf, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran). Mereka meyakini bahwa prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat diterapkan baik di sektor publik maupun swasta.
3. Paradigma 3 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, 1950-1970): Terdapat ketegangan antara administrasi negara dan ilmu politik, dengan pandangan baru yang menganggap administrasi publik adalah bagian dari ilmu politik.
4. Paradigma 4 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, 1956-1970): Paradigma ini mengembangkan pemahaman tentang teori organisasi dan manajemen, dengan fokus pada perilaku organisasi dan penerapan teknologi modern. Namun, lokusnya menjadi kabur dikarenakan adanya asumsi konsep yang berlaku di bisnis dan administrasi publik.
5. Paradigma 5 (Administrasi Negara

sebagai Administrasi Negara, 1970-sekarang): Pendekatan ini memperjelas cakupan studi administrasi, mencakup dinamika organisasi, prinsip pengelolaan, dan analisis kebijakan yang berorientasi pada masyarakat, dengan penekanan pada isu-isu dan kebutuhan publik.

6. Paradigma 6 (Governance): Taufiqurokhman (2018) menjelaskan bahwa sistem pemerintahan memiliki dua peran fundamental: perumusan arah dan strategi nasional serta pelaksanaan kebijakan. Pemisahan kekuasaan Montesquieu memisahkan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana legislatif dan yudikatif menetapkan tujuan negara, sementara eksekutif melaksanakan kebijakan secara apolitis.

Kebijakan Publik

Menurut Anderson (2006), Kebijakan yang memiliki tujuan yang dapat dilaksanakan oleh beberapa orang maupun kelompok yang memiliki hubungan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang mempunyai lima tahapan dalam proses kebijakan, yaitu:

1. Formulasi masalah (*problem formulation*), mengidentifikasi isu-isu yang berkembang sebagai dasar pembuatan kebijakan, serta cara memasukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), reaksi dari identifikasi masalah dengan mengembangkan alternatif dalam mengatasi masalah
3. Menentukan kebijakan (*adapting formulation*) pemilihan alternatif paling efektif untuk dijadikan kebijakan.
4. Implementasi (*implementation*) pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk tugas yang dilakukan
5. Evaluasi (*evaluation*) melibatkan

pengukuran tingkat keberhasilan kebijakan yang dilaksanakan termasuk penilaian pelaku yang terlibat dan dampaknya yang timbul. Hasil evaluasi digunakan sebagai landasan untuk penyempurnaan

Implementasi Kebijakan

Suatu tahapan yang diputuskan dalam suatu kebijakan yang dimana nantinya dapat memunculkan berbagai keputusan diantara orang-orang yang terkena dampak dari kebijakan tersebut yang diketahui keberhasilannya maupun kegagalan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Agustino (2006). Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Supamo, 2017: 40). Mengelompokkan mmenjadi 4 fenomena dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan, menitikberatkan pada kompleksitas masalah, dengan mempertimbangkan kesulitan teknis, variasi karakteristik, proporsi kelompok sasaran dan lingkup perilaku yang terlibat
2. Karakteristik kebijaksanaan untuk menstruktur proses implementasi, mempertimbangkan kejelasan dan konsistensi tujuan, penerapan sebab akibat, alokasi sumber daya yang akurat, integrasi hierarki antara lembaga, prosedur pengambilan keputusan dan akses terhadap pihak eksternal selaku pejabat pelaksana.
3. Lingkungan Kebijakan berupa Variabel di luar kebijaksanaan seperti dukungan politik yang mempengaruhi dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat dan sikap sumber daya kelompok sebagai pejabat pelaksana
4. Tahapan dalam proses implementasi, dengan melihat bagaimana ketersediaan kelompok

sasaran terhadap dampak yang diberikan dari kebijakan tersebut sehingga dapat dilakukannya perbaikan kepada regulasi yang ada dalam undang-undang.

Ketepatan Implementasi

Menampilkan efektivitas kebijakan dalam proses suatu implementasi dengan melihat melalui “lima tepat”, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan, melihat sisi kebijakan agar dapat menyelesaikan suatu masalah, kebijakan juga dilihat melalui lembaga yang membuat kebijakan yang disesuaikan dengan sifat masalah
2. Ketepatan Pelaksana, kebijakan yang mengarah kepada aktor yang terlibat baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat yang saling bekerja sama dalam memberikan tanggung jawab suatu kebijakan
3. Ketepatan Target, ketetapan yang mencangkup, kesesuaian target di lapangan, adanya tumpang tindih target, dan adanya konflik dengan target dari kebijakan
4. Ketepatan Lingkungan, adanya kekuasaan dari kewenangan kebijakan yang berbentuk jaringan kelompok yang dapat memberikan dampak kepada masyarakat dan pemerintah,
5. Ketepatan Proses, implementasi yang terdiri dari *policy acceptance*, *policy adoption*, dan *strategic readiness*, ketiga proses tersebut saling berkaitan dengan tahapan kebijakan mulai dari perencanaan hingga pemantauan

Program Indonesia Pintar

Program yang dibuat pemerintah untuk menjamin biaya pendidikan merupakan bentuk keberlanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), dengan memberi bantuan dana dari pemerintah kepada siswa yang berada pada keluarga yang kurang mampu dalam membayar biaya sekolah anak mereka agar dapat

menempuh pendidikan yang lebih baik, sehingga Program Indonesia (PIP) mempunyai tujuan yang tertera pada peraturan Kemendikbudristek No 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar, yaitu:

1. Meningkatkan akses bagi peserta didik mulai dari usia 6 tahun sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan yang layak selama wajib belajar 12 tahun
2. Mencegah peserta didik untuk memungkinkan tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah karena kondisi finansial yang kurang
3. Menarik kembali siswa yang putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan

Syarat mendaftarkan bantuan Program Indonesia Pintar menurut peraturan Kemendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, yaitu:

1. Peserta didik yang mempunyai Kartu Indonesia Pintar
2. Peserta didik berasal dari keluarga yang miskin/rentan miskin atau memiliki pertimbangan khusus seperti:
 - a. Peserta didik berasal dari keluarga PKH
 - b. Peserta didik berasal dari keluarga pemegang KKS
 - c. Peserta didik berstatus yatim/piatu/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
 - d. Peserta didik terkena bencana alam
 - e. Peserta didik yang tidak bersekolah (*drop out*)
 - f. Peserta didik mengalami kelainan fisik, korban musibah, orang tua terkena pemutusan hubungan kerja, berada di daerah konflik, keluarga terpidana, betanda di lembaga pemasyarakatan dan memiliki

lebih dari 3 saudara dalam satu rumah.

- g. Peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal

pemerintah diharapkan dapat mengatasi siswa yang telah putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan yang layak, karena program ini juga dirancang untuk meringankan beban biaya pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu termasuk biaya langsung maupun tidak langsung

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan mengeksplorasi peristiwa melalui ragam metode yang telah ada. Pendekatan deskriptif kualitatif fokus pada pengumpulan data dalam bentuk naratif, visual, dan non-numerik yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dokumentasi visual, serta sumber informasi lainnya (Candra Guzman dan Oktarina, 2018). Pendekatan

ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi Program Indonesia di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan Staf Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jawa Tengah, Guru BK SMA 4 Kota Semarang, Guru BK SMA 9 Kota Semarang, Guru BK SMA Mardisiswa, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Mardisiswa dan PLT Kelurahan Srandol Wetan, serta observasi langsung di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk mendalami teori-teori relevan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk menjaga validitas data yang dikumpulkan. Subjek penelitian dipilih berdasarkan relevansi dengan implementasi kebijakan PIP di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Ketepatan Kebijakan

Memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam kebijakan guna meningkatkan efektifitas kebijakan tersebut Riant Nugroho (2021: 51-52). Dalam proses implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 10 Tahun 2020 tujuan dari PIP yaitu mencegah peserta didik yang diakibatkan kondisi finansialnya. Sub fenomena dari fenomena ketepatan kebijakan yaitu kesulitan teknis yang menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan PIP. Dilihat dari sub fenomena Tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Banyumanik belum sepenuhnya tercapai. Meskipun pelaksana telah berupaya maksimal untuk merealisasikan kebijakan, tujuan utama mencegah peserta didik putus sekolah masih belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua peserta didik mengenai Program Indonesia Pintar.

Sub fenomena kedua mengenai variasi karakteristik kebijakan berupa peran setiap instansi dalam pelaksanaan PIP, dilihat bahwa Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 1, Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Banyumanik, dan Kelurahan Srandol Wetan telah melaksanakan perannya

dengan baik sebagai pelaksana dan pengelola Program Indonesia Pintar (PIP).

Sub fenomena ketiga yaitu kelompok sasaran yang melihat bagaimana pengaruh PIP kepada sekolah yang berada di Kecamatan Banyumanik. Dilihat bahwa tujuan dari Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik khususnya jenjang SMA belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Meskipun dari pihak sekolah sudah memastikan sudah berupaya dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut namun pada tujuan mengenai pemahaman PIP masyarakat lebih fokus kepada dana yang diberikan dari pemerintah, bukan mengenai manfaat dan tujuan utama dari program tersebut. Fenomena ketepatan kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan hal ini disebabkan adanya seperti keterlambatan aktivasi akun akibat kurangnya pemahaman orang tua dan siswa yang tidak terdaftar dalam DTKS. Meskipun peran Cabdin Wilayah 1 dan sekolah sudah baik, diperlukan sosialisasi intensif dan penyelarasan data agar program lebih optimal.

Ketepatan Pelaksana

Pelaksana adalah unsur yang didalamnya terdapat pihak yang menjalankan tujuan dan sasaran organisasi dengan menganalisis dan merumuskan kebijakan, strategi, pengambilan Keputusan penyusunan, pengawasan dan evaluasi menurut Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006: 28). Fenomena ini melihat bagaimana ketetapan aktor pelaksana kebijakan sebagai sub fenomena dengan melihat alokasi sumber daya yang digunakan, terlihat bahwa ketepatan aktor suatu kebijakan suatu kebijakan, dapat dikatakan sudah membantu dan efektif dalam keberjalannannya. Hal tersebut dilihat dari adanya sosialisasi yang dilakukan Cabdin Wilayah 1 kepada beberapa pihak yang terlibat kemudian dari pihak sekolah menyampaikan kepada peserta didik

mengenai mekanisme penyaluran PIP. Sub fenomena kedua yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab, dilihat adanya koordinasi yang dilakukan oleh sekolah yang terlibat dengan Cabdin Wilayah 1 dan kelurahan mengenai pelaksanaan PIP, terlihat bahwa Cabdin Wilayah 1 dengan sekolah dan kelurahan mengenai penyampaian informasi PIP sudah dapat dipahami oleh masyarakat, namun dalam mengatasi masalah mengenai PIP masih terdapat kendala seperti alur aktivasi akun PIP terkait pendanaan dan pendaftaran yang belum melakukan aktivasi karena masih ditemukan berkas-berkas yang belum lengkap.

Fenomena Ketepatan Pelaksanaan dilihat bahwa, sub fenomena ketepatan aktor kebijakan dan pembagian tugas, pihak yang terlibat telah memahami sebab-akibat kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) berkat sosialisasi Cabdin Wilayah 1 kepada sekolah. Pembagian tugas juga berjalan baik, dengan Cabdin bertugas memonitor dan mengusulkan PIP, sementara sekolah mengajukan PIP. Pembagian yang jelas ini membantu meminimalkan kendala dalam pelaksanaan program.

Ketepatan Target

Menurut Tachjan (2006:28), kelompok sasaran atau target kebijakan adalah kelompok atau individu dalam masyarakat yang menerima barang atau jasa sebagai dampak kebijakan. Dalam konteks Program Indonesia Pintar (PIP), ketepatan target ditentukan oleh prosedur pengambilan keputusan oleh lembaga pelaksana serta pemahaman instansi terkait terhadap prosedur tersebut, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan hasil analisis, sub fenomena prosedur pengambilan keputusan dan ketepatan target dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar menunjukkan bahwa sekolah, Cabdin Wilayah 1, dan kelurahan berperan aktif menyeleksi

peserta didik yang layak menerima PIP. Informasi disampaikan secara intensif melalui WhatsApp Group dan pertemuan langsung, yang membantu meminimalkan kesalahan data serta memastikan informasi tersampaikan dengan jelas kepada peserta didik dan orang tua.

Ketepatan Lingkungan

Menurut Darsono (1995), lingkungan mencakup semua benda dan kondisi di dalamnya, termasuk aktivitas manusia dalam suatu ruang, yang dapat memengaruhi kesejahteraan serta kelangsungan hidup manusia. Ketepatan lingkungan mempunyai sub fenomena dukungan masyarakat dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik, walaupun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Hal ini dilihat dari pemberian bantuan PIP telah meningkatkan motivasi siswa yang sebelumnya tidak bersekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan. Meskipun masyarakat tidak terlibat langsung dalam menentukan kelayakan peserta didik, pihak sekolah dinilai cukup responsif dan transparan dalam pengusulan. Keberhasilan program ini juga dipengaruhi oleh sikap dan peran sumber daya manusia di sekolah dan kelurahan, didukung oleh keterlibatan sekolah dan masyarakat. Namun, peningkatan koordinasi dan transparansi tetap diperlukan untuk memastikan keselarasan pemahaman dan kelancaran implementasi program.

Sub fenomena kedua yaitu sikap sumber daya, terlihat bahwa sudah cukup baik, terlihat bahwa Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 1, terdapat dua petugas yang mengelola PIP dengan efektif dalam sosialisasi dan koordinasi dengan sekolah. Di Kelurahan Srandol Wetan, meski tidak ada petugas khusus, petugas PKH mendukung pendaftaran. Di sekolah, petugas seperti guru BK sudah mencukupi, namun tantangan muncul ketika petugas kurang memahami

prosedur teknis verifikasi data. Fasilitas, seperti komputer, sudah memadai, tetapi pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut dapat meningkatkan efektivitas program, sesuai dengan pandangan Robbins dan Judge yang menekankan pentingnya keterlibatan individu dan dukungan fasilitas dalam kinerja organisasi.

Sub fenomena ketiga yaitu dukungan stakeholder terkait atasan, dukungan tersebut sudah dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dilihat dari pihak sekolah dan kelurahan berperan aktif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat serta memantau penggunaan dana PIP oleh orang tua. Meskipun ada pedoman jelas tentang kriteria besaran PIP dalam Persekjen Kemendikbud Ristek No. 14 Tahun 2022, pihak sekolah dan Cabdin tidak dapat menentukan besaran tersebut, sehingga mereka hanya memantau alokasi dana melalui orang tua untuk memastikan penggunaan yang tepat. Secara keseluruhan, Fenomena Ketepatan lingkungan instansi pelaksana PIP dikatakan sudah baik, namun pemantauan dan koordinasi yang lebih intensif dapat meningkatkan efektivitas program dan mencapai tujuan PIP dengan lebih optimal.

Ketepatan Proses

Sumarto dalam Semobodo (2006: 21) menjelaskan bahwa partisipasi melibatkan interaksi antara stakeholder dan individu, dimana ketepatan proses mempunyai sub fenomena kesiapan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan PIP. Terlihat Cabdin Wilayah 1 dan pihak sekolah yang melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima PIP sesuai dengan kriteria dalam Persekjen Kemendikbud Ristek Nomor 14 Tahun 2022. Pelaksanaan transparansi data penerima sudah dilakukan oleh pihak sekolah, namun masih ada keterlambatan dalam penyaluran dana PIP. Hal ini disebabkan oleh beberapa peserta didik yang belum

atau terlambat melakukan verifikasi akun, sehingga dana cair dengan terlambat.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

Berdasarkan teori implementasi Program Indonesia Pintar menurut Mazmanian dan Sabatier (Supamo, 2017: 40). terdapat beberapa faktor mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yaitu:

a. Karakteristik Masalah

Fenomena yang mengutamakan kepada kompleksitas suatu masalah dengan mempertimbangkan teknis, keberagaan pelaku dengan ruang lingkup yang ada, Mazmanian dan Sabatier dalam Supamo (2017: 40). dalam karakteristik masalah dibutuhkan koordinasi stakeholder untuk memberikan arahan dalam kebijakan Program Indonesia Pintar. Program ini dinilai cukup efektif dalam pelaksanaannya. Cabdin Wilayah 1, sekolah, dan kelurahan rutin melakukan sosialisasi, meskipun tidak setiap bulan. Jika terdapat perubahan kebijakan atau informasi tambahan, Cabdin Wilayah 1 segera menyampaikan melalui WhatsApp Group, memungkinkan instansi cepat menyesuaikan dan menyosialisasikan kepada orang tua serta peserta didik penerima PIP. Komunikasi melalui pertemuan langsung dengan stakeholder, termasuk Dinsos dan pihak bank, memastikan kebijakan dipahami dengan jelas. Dengan konsistensi sosialisasi dan komunikasi yang terstruktur.

b. Dukungan Politik

Menurut Hague et al. (1998), politik adalah kegiatan yang melibatkan proses pengambilan keputusan kolektif dan mengikat dalam suatu kelompok untuk beradaptasi. Dalam konteks pelaksanaan

Program Indonesia Pintar (PIP), dukungan politik mencakup peran pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung kelancaran program tersebut. Dukungan politik dapat dikatakan sudah cukup baik, hal ini dilihat dari Cabdin menyampaikan informasi dari pemerintah pusat terkait Program Indonesia Pintar (PIP) melalui sosialisasi, sehingga mudah dipahami oleh pihak kelurahan, sekolah, dan orang tua peserta didik. Namun, masih terdapat kendala dalam pengusulan PIP, seperti adanya kepentingan partai yang memengaruhi proses, sehingga instansi kesulitan memastikan data PIP tepat sasaran. Prosedur yang hanya memerlukan NIK dan KK sebagai syarat juga mmenjadi hambatan dalam memastikan akurasi data penerima bantuan.

c. Tahapan Implementasi

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Supamo (2017:40), tahapan implementasi mencakup indikator seperti lembaga pelaksana, ketersediaan sasaran, keluaran kebijakan, dan kesediaan kelompok sasaran untuk mematuhi kebijakan. Dalam konteks Program Indonesia Pintar (PIP), tahapan ini mencerminkan kondisi sosial masyarakat serta sikap sumber daya terhadap kebijakan yang diterapkan. Sub fenomena tahapan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan hasil yang cukup baik dan efektif dalam mmeningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hal ini terlihat dari respons positif masyarakat dan pihak sekolah yang merasa terbantu, terutama dalam memenuhi kebutuhan peralatan sekolah, sejalan dengan tujuan PIP untuk mendukung anak-anak kurang mampu. Namun, diperlukan komitmen berkelanjutan untuk memastikan program terus berjalan dengan baik, cakupannya diperluas, dan tujuan mengurangi angka putus sekolah tercapai secara optimal. Meskipun program ini telah cukup efektif, peningkatan konsistensi dukungan dan pemantauan tetap diperlukan untuk hasil yang lebih maksimal.

Berdasarkan analisis, sub fenomena yang mencakup karakteristik masalah, dukungan politik, dan tahapan implementasi dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) berjalan cukup baik. Koordinasi yang dilakukan Cabdin Wilayah 1 dengan sekolah dan kelurahan, melalui WhatsApp Group maupun tatap muka, mendukung kelancaran penyampaian informasi dan perubahan regulasi. Namun, dukungan politik terkadang dipengaruhi oleh campur tangan partai politik, yang mengganggu ketepatan sasaran PIP. Hal ini terjadi karena berkas persyaratan tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang PIP, sering kali digunakan untuk kepentingan pribadi dalam kampanye. Pada tahap implementasi, manfaat PIP sudah terlihat signifikan, dengan perubahan kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan. Campur tangan politik ini perlu dihilangkan untuk mmeningkatkan efektivitas program.

Faktor Temuan dalam Implementasi Program Indonesia Pintar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Banyumanik, terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan Program Indonesia Pintar SMA di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang

a. Kepentingan Partai Politik

Kepentingan partai politik mmenjadi salah satu faktor yang ditemukan dalam kondisi lapangan. Menurut Sigmund Neuman (1963), partai politik adalah organisasi aktivitas politik yang bertujuan menguasai kekuasaan pemerintah serta memperoleh dukungan rakyat melalui persaingan antar golongan tertentu. Fenomena kepentingan partai politik, masih perlu diperbaiki karena tidak sejalan dengan tujuan Program Indonesia Pintar (PIP). Beberapa peserta didik yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru menerima bantuan karena diusulkan melalui jalur partai. Akibatnya, penyaluran

bantuan mmenjadi tidak tepat sasaran dan mempengaruhi kuota yang ditetapkan oleh kementerian setiap tahunnya. Selain itu, ketidaktepatan ini menyulitkan Cabdin dalam memantau aktivasi akun peserta didik yang terkait dengan kepentingan partai.

Berdasarkan hasil analisis, kepentingan partai politik perlu diperbaiki karena tidak selaras dengan tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan lebih mengarah pada pemenuhan kepentingan partai. Kepentingan ini cenderung menyebabkan bantuan PIP tidak tepat sasaran, sehingga menyulitkan pelaksana seperti Cabdin Wilayah 1, sekolah, dan kelurahan dalam mendata peserta didik penerima bantuan secara akurat hal tersebut jika dilakukan dapat menambah jumlah kuota penerima Program Indonesia Pintar.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Program Indonesia Pintar di SMA Kecamatan Banyumanik telah berjalan dengan baik, namun belum maksimal. Rincian prosesnya meliputi:
 - a. Ketepatan pelaksana, diadakannya sosialisasi membuat Cabdin Wilayah 1 dan sekolah dalam memonitoring, mengevaluasi dan mengusulkan PIP mmenjadi lebih baik.
 - b. Ketepatan Target, prosedur dalam pendaftaran PIP dapat dipahami oleh orang tua melalui informasi yang diberikan guru dengan syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai yang tercantum dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar
 - c. Ketepatan Lingkungan, dukungan masyarakat berupa melaporkan kepada Cabdin Wilayah 1 bila ditemukan penerima PIP yang tidak sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam regulasi Permendikbud No.

10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar terdapat fenomena yang perlu diperbaiki, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan Kebijakan, pemahaman orang tua dan peserta didik mengenai alur mekanisme pendaftaran sehingga peserta didik lupa melakukan aktivasi akun.
 - b. Ketepatan Proses, proses dalam penyaluran dana terhambat disebabkan perserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Karakteristik Masalah, mengatasi masalah dalam keberjalanan PIP Cabdin Wilayah 1 melakukan sosialisasi atau menyampaikan informasi melalui media sosial kepada sekolah dan pihak bank terkait.
 - b. Tahapan Implementasi, manfaat dari PIP sudah sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat dengan membiayai pendidikan anak-anaknya sehingga dapat melanjutkan sekolah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat fenomena yang belum sesuai dalam pelaksanaan PIP yaitu, dukungan Politik pemangku kebijakan yang mengusulkan peserta didik untuk mendaftar PIP menggunakan kriteria dan syarat yang tidak sesuai dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, faktor lain yang mempengaruhi PIP yaitu, Kepentingan Partai Politik berupa pengusulan PIP melalui partai mengakibatkan penyaluran dana PIP mmenjadi tidak tepat sasaran karena syarat yang dibutuhkan berbeda dengan regulasi yang ada. Ekonomi: Keterbatasan

ekonomi masyarakat mmenjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan gizi.

B. Saran

Berdasarkan apa yang sudah diteliti oleh peneliti, ditemukan beberapa hambatan dalam Implementasi program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik. Maka dari itu penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Saran yang dapat diberikan kepada implementasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik, yaitu:
 - a. Pada fenomena Ketepatan Kebijakan, Diharapkan Cabdin Wilayah 1 melakukan Sosialisasi intens yang dilakukan setiap satu bulan sekali, hal ini agar dapat memonitoring dan mengevaluasi keberjalanan PIP di setiap sekolah terkait verifikasi dan validasi data. Diperlukan mekanisme transparan untuk memastikan setiap pihak memenuhi kewajibannya. Pembentukan forum koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak untuk berbagi informasi dan update program sangat penting. Selain itu, perlu dibuat pos pelayanan informasi yang mudah diakses oleh warga, baik melalui aplikasi maupun pertemuan langsung dengan fasilitator untuk mengakomodasi keluhan dan ide masyarakat.
3. Saran yang dapat diberikan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi Impelentasi Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik yaitu, terkait dukungan politik, Cabdin Wilayah 1 diharapkan dapat melakukan monitoring dengan dibentuknya tim khusus untuk memastikan bahwa data penerima yang diusulkan benar-benar valid dan memastikan prosedur yang digunakan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku

4. Saran yang dapat diberikan untuk faktor lain terkait dengan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Kecamatan Banyumanik, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendalami PIP dengan fokus pada pengaruh kepentingan partai politik, kemudian Kemendikbudristek dapat memperbaharui regulasi dengan menambahkan syarat yang jelas jika partai dapat mengusulkan calon penerima PIP

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Sholicin (2008). Pengantar Kebijakan Publik, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino, Leo (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV ALFABETA.
- Albari, A. H., Gosal, R., & Pangemanan, F. (2019). Implementasi Program Cerdas Command Center Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Ardiansyah, A. Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi FISIP.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- DWIJAYANTI, A. (2013). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR LARANGAN SIDOARJO. *Publika*, 1(3).
- Ega Aditya Alfa Riqi (2020). Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Jurnal: UN DIP*
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (2008). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, D. H. (2022). PERUBAHAN KELEMBAGAAN SOSIAL DI DESA KOTABATU KABUPATEN BOGOR (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Hamdani, M. (2016). Good corporate

- governance (GCG) dalam perspektif agency theory. Semnas Fekon, 2016, 279-283.
- Hoar, M. R., Kurniawan, I. S., & Herawati, J. (2021). Kinerja karyawan: Peran kualitas sumber daya manusia, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2), 475-481.
- Igiany, P. D. (2020). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKeMB)*, 2(1), 67-75.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Data Pokok PSMK 2013 terakses melalui: <http://datapokok.ditpsmk.net/detil.php?id=0402060001>. Diakses Tanggal 5 Mei 2024. Pukul 15.00 WIB.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP). Jakarta: KEMENDIKBUD. Diakses Tanggal 5 Mei 2024. Pukul 15.00 WIB.
- Krisnadi, A., & Budiati, L. (2012). Partisipasi Stakeholders Dalam Capaian Program Desa Mandiri Pangan di Desa Wukirharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 8(3), 284-294.
- N. Eni Rohaeni & Oyon Saryono. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* 2018 June, Volume 2 Number 1
- Palinggi, Y. (2015). Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Bagian Operasional Pada PT. Rinjani Kartanegara.
- Pasolong, Harbani. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: CV ALFABETA.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
- Permendikbud Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020
- Putra, N. P. A., & Harianto, S. (2022). Konstruksi sosial mahasiswa urban di kota Surabaya. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(2), 306-325.
- Rahmi, L. (2018). Kepemimpinan dan birokrasi perpustakaan dalam perspektif Islam: Sebuah tinjauan teoritis untuk masa depan. *SHAUT AL-MAKTABAH*, 10(1).
- Rambe, T., Sari, S. M., & Rambe, N. (2021). Islam Dan Lingkungan Hidup: Menakar Relasi Keduanya. *Abrahamic Religions*, 1(1), 1-14.
- Republik Indonesia (2003). UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.
- Riant Nugroho (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.
- Rini Septiani Astuti (2016). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Semin Yogyakarta. *Jurnal: Yogyakarta: UNY*.
- Riska Anugrah (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung (Studi kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal). *Jurnal: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
- Rista, I., Tyas, M. A. S., Daroini, S., Shintawati, E. N., & Goo, F. Pengaruh Kepemimpinan dan Pelayanan Aparatur Desa Terhadap Partisipasi Warga dalam Pembangunan di Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan.
- Rokhman, K. (2022). Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi di Desa Pliken dan Desa Sanggreman Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 6(1), 454-462.
- Sartika, D., & Nengsi, A. R. (2022). Kemampuan Mahasiswa dalam Menerapkan Fungsi-Fungsi Manajemen di Sekolah. *Inspiratif Pendidikan*, 11(2), 302-313.
- Septiani, A. N., & Maruf, M. F. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata (Studi di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 7(7).
- Setyaningsih, M. L., Syaharani, F., Valentine, F., Mayasari, F., Sari, I., Arifki, K. D., ... & Alridho, M. (2024). Analisis

Pengaruh Teman Sebaya Dalam Pengambilan Keputusan Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling R001 Angkatan 2021 Universitas Jambi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11801-11810.

Sianturi, R. R., Wahyudin, U., & Suryana, A. (2019). Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kepuasan Komunikasi. *Metacommunication; Journal of Communication Studies*, 4(1), 12-26.

Situs/web/Internet :

Sue, Y., DH, D. P., & Khasanah, I. (2021). Analisis Penggunaan Metode Eksperimen terhadap kemampuan Anak Usia Dini Dalam Melakukan Analisa Sebab–Akibat. *Jurnal*

S

e
h
a
t
p
o
u
r
,
M
.
(
2
0
2
0
)
.
T
a
l
e
n
t
m
a
n
a
g
e
m
e
n

Wawasan Pendidikan, 1(2), 272-282.

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV ALFABETA.

Susrianto, D., & Jamrizal, J. (2023). Hubungan Suprastruktur, Infrastuktur Pendidikan Terhadap Polesosbud. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1-19.

T. Keban, Yeremias (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Taufik. (2013). Implementasi Peraturan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119–218.

t
i
n

g
o
v
e
r
n
m
e
n
t

o
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
s
:
i
d
e
n

t
i
f
i
c
a
t
i
o
n

o
f

c
h
a
l
l
e
n
g
e
s

a
n
d
r
a
n

k
i
n
g
t
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
o
a
d
d
r
e
s
s
t
h
e
m
.